KALANGWAN
JURNAL PENDIDIKAN AGAMA, BAHASA DAN SASTRA
Vol.XVI No.2 Bulan September 2026

p-ISSN : 1979-634X	e-ISSN : 2686-0252	http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/kalangwan/index

ESTETIKA VISUAL DALAM DESAIN PARIWISATA KOTA DAN RESPON SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF BANDUNG: TINJAUAN AGAMA, BAHASA, DAN SASTRA SUNDA

Oleh
Inggi Lestari
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
inggilestaridananjaya@gmail.com
Diterima 8 Oktober 2026; Direvisi; 28 Oktober 2026 ; Diterbitkan: 30 Oktober 2026

Abstract

This study aims to dissect the relationship between the Dynamics of the Urban Space Design Process (X1) and the Effectiveness of Sustainable Tourism Infrastructure Development (X2) through the lens of linguistics, literature, and Sundanese religious cosmology in Bandung. An explanatory sequential Mixed Methods approach was used by distributing questionnaires to 400 respondents in Braga, Cihapit, Dago, and Cilaki, followed by in-depth interviews based on literary discourse analysis. Statistical data processing using SPSS showed that the correlation between X1 and welfare recovery (Y) had a positive influence with a determination coefficient of $R^2 = 0.082$ and significance $p = 0.087$. Qualitatively, spatial planning that ignores local language toponymy and the philosophy of Tri Tangtu di Buana triggers social resistance. Modern urban design often erases the traces of oral literature and the religious memory of communal societies. This study found that successful tourism infrastructure is not only determined by the ergonomics of asphalt and concrete but by the spatial layout's ability to maintain the dialectic of silih asih, silih asah, silih asuh. The integration of the Sundanese Linguistic Landscape and inclusive design is the main key to the resilience of tourism MSMEs. Therefore, urban revitalization must restore the spiritual soul of the area to avoid cultural uprooting.
Keywords: Visual Aesthetics; Sundanese Literature; Spatial Toponymy; Creative Economy; Tourism Governance; Religious Cosmology; Urban Design.

PENDAHULUAN

Bahasa Dinamika transformasi tata ruang global saat ini menunjukkan pergeseran paradigma yang sangat masif, di mana desain perkotúaan tidak lagi sekadar berorientasi pada estetika fisik semata, melainkan berevolusi menjadi instrumen strategis untuk mencapai ketahanan ekonomi dan inklusivitas sosial melalui optimalisasi sektor pariwisata berkelanjutan (World Tourism Organization, 2021; Mihardja, 2019; Day, 2005). Integrasi antara tata ruang kreatif dan ekonomi pariwisata telah menjadi salah satu katalisator utama kebangkitan ekonomi pasca-krisis, menyumbang porsi besar pada PDB dunia (Dananjaya, 2026; Al-Hagla & Al-Sulbi, 2025; Afrizal, 2019). Organisasi internasional menegaskan urgensi penciptaan

permukiman inklusif melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang selaras dengan nilai-nilai kosmologi agama dan kelokalan (Kavaratzis & Ashworth, 2005; Wibowo, 2023). Fenomena ini menuntut pembaharuan konsep desain urban yang humanis, mentransformasi ruang pasif menjadi episentrum interaksi budaya dan transaksi ekonomi tanpa mencabut akar identitas (Mittila & Lauren, 2014; Syafrizal, 2019; Yudithia et al., 2024). Pergeseran paradigma makro ini menyiratkan bahwa arsitektur perkotaan merupakan ekosistem simbiotik yang mendikte arah masa depan ruang spiritual dan sosial peradaban global (Carr, 1992; Wibowo, 2015; Zamanifard dkk., 2018).

Pergeseran berskala global tersebut secara fundamental memengaruhi konstelasi struktur sosial, makroekonomi, dan ketahanan ekologis, yang di dalamnya memuat identitas agama dan narasi sastra sebuah etnis (Mittila & Lauren, 2014; Etzkowitz, 2008; Afrilia et al., 2025). Dari perspektif ekonomi, keberhasilan *city branding* melalui revitalisasi historis terbukti meningkatkan durasi tinggal wisatawan dan menginjeksi likuiditas ke nadi UMKM lokal (Carr, 1992; Wibowo, 2015; Ahmadi & Muhjad, 2024). Namun, desain infrastruktur juga bertindak sebagai wadah asimilasi budaya; jika gagal, segregasi kelas akan mengubur nilai luhur komunal (Maryati, 2007; Apriani & Asnawi, 2015; Alfianti et al., 2026). Di sisi lingkungan, urban sprawl yang serampangan mengancam keanekaragaman hayati sekaligus mengikis ruang riung (berkumpul) yang diagungkan dalam tradisi Sunda (Jain & Dimri, 2016; Kamil, 2018; Haryani dkk., 2024). Intervensi desain perkotaan dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap dimensi *niskala* (tak kasat mata) dan sastra lisan warga agar infrastruktur tidak menjadi sekadar lanskap beton tanpa jiwa (Basundoro, 2013; Kunto, 1985; Rachmiatie dkk., 2020).

Menarik fenomena global tersebut ke dalam skala nasional, Indonesia saat ini gencar mendorong rancang bangun pariwisata yang terefleksikan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025 (Kemenpar, 2010; Pratama, 2018; Maulina & Atika, 2019). Provinsi Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, menempatkan diri sebagai episentrum industri kreatif yang dijiwai oleh filosofi agama dan leksikon bahasa Sunda (BPS Jawa Barat, 2024; Kustedja, 2012; Voskuil, 2007). Bandung, dengan memori lisan Parijs van Java, memiliki DNA historis di mana arsitektur dihidupkan melalui percakapan, tawar-menawar, dan sastra jalanan (Widiawaty dkk., 2019; Disdukcapil Kota Bandung, 2024; Herdiana, 2020). Namun, beban spasial 2,5 juta jiwa memaksa ruang *heritage* bersaing dengan laju modernisasi yang kerap membungkam bahasa lokal di ruang publik (Permana, 2018; Dananjaya, 2026; Pramadhika & Syaodih, 2022). Sinkronisasi laju investasi komersial dengan nilai-nilai kosmologis agama menjadi krusial agar kota tidak mengalami bunuh diri kultural (Dewiyanti, 2015; Leitmann, 1999; Suharto, 2009).

Pengerucutan lanskap regional ini bermuara pada fokus krusial: titik temu antara Dinamika Proses Desain Ruang Perkotaan (Variabel X1) dan Efektivitas Pengembangan Infrastruktur Kepariwisataan Berkelanjutan (Variabel X2) (Dananjaya, 2026; Wibowo, 2023; Prihatin, 2015). Tema ini esensial karena mengukur rekayasa spasial—mulai dari jalur pejalan kaki hingga integrasi *signage multilingual* bertuliskan aksara Sunda—dalam memandu perilaku wisatawan (Syafrizal, 2019; Dananjaya, 2026; Annisa & Weishaguna, 2023). Integrasi toponimi lokal tidak hanya memperindah secara visual, namun mengembalikan martabat bahasa ibu ke permukaan aspal (Maftuhin, 2017; Dawud dkk., 2019; Riyanto, 2018). Bingkai spesifik ini menegaskan bahwa keberlanjutan infrastruktur terkait erat dengan kelestarian teks-teks dan sastra keseharian yang dihidupi pedagang pasar (Aswal, 2019; Kamil, 2018; Marina Puspita, 2021). Desain ruang yang ergonomis menjadi mesin penggerak ekonomi yang merangkul kearifan lokal tanpa mendiskriminasi (Kurniati, 2016; Rabhani dkk., 2020; Dananjaya, 2026).

Secara normatif, konsep pariwisata berkelanjutan mengharuskan alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30%, namun hal ini lebih dari sekadar regulasi; ia adalah representasi konsep *Leuweung Larangan* dalam religi Sunda (Pramadhika & Syaodih, 2022; Kusnandar, 2022; Kholik, 2020). Konsep Smart City berbasis Pentahelix menempatkan

masyarakat lokal sebagai subjek pencerita (kolaborator sastrawi) sejak fase rancangan purwarupa (Shenker, 2020; Sadewo dkk., 2018; Basundoro, 2013). Ruang publik utopis adalah tempat wisata yang juga menjadi inkubator tradisi lisan, tempat agama dan seni rupa bertabrakan secara harmonis (Syarifuddin, 2018; Sukriah, 2012; Sierra-Porta dkk., 2023). Anomali fakta di lapangan justru mempertontonkan kemacetan, penggusuran PKL, dan peminggiran identitas Linguistic Landscape Sunda oleh papan reklame kapitalis (Wardhani, 2010; Rahman & Damayanti, 2022; Mulyana dkk., 2019). Tanpa sentuhan humanistik berbasis sosioreligius, revitalisasi kota jatuh ke dalam kosmetik visual (place beautification) yang miskin makna (Nurcahya & Alexandri, 2020; Pramezwary et al., 2021; Dananjaya, 2026).

Secara epistemologis, ruang perkotaan bukanlah sekadar tumpukan aspal, melainkan dialektika sosial, agama, dan sastra yang bergerak secara konstan dan fluktuatif (Forrester, 1969; Lewin, 1947; Batty, 2013). Ruang kota mencatat pergerakan industri mikro yang tidak linier; sebuah pergulatan *niskala* dan *sekala* yang dihayati warga melalui tuturan bahasa ibu mereka (Kodhyat, 2001; Wahab, 2005; Castells, 1989). Pariwisata urban kini bermutasi menjadi ruang negosiasi ekonomi politik, di mana modal asing kerap berbenturan dengan nilai agamis dan sastra jalanan (Arend, 1987; Friedman, 1966; Trancik, 1986). Paradigma reduksionis era industrial telah usang; kota modern dipaksa menyadari bahwa kedalaman makna ruang setara pentingnya dengan kelayakan teknis beton (Evers, 1992; Budihardjo & Sujarto, 2009; Lynch, 1981). Desain kota di abad ke-21 tidak bisa menceraikan keberadaan manusia dari batasan visual dan kosmologisnya (Yeang, 1995; Hanson, 1998; Hillier, 2007).

Kajian ini berpijak pada fondasi kokoh Teori *Social Construction of Reality* yang meyakini ruang fisik adalah narasi teks yang dikonstruksi secara aktif oleh aktor lokal dan pejalan kaki (Berger & Luckmann, 1966; Bourdieu dalam Harker et al., 2005; Kellner, 2010). Diperkaya oleh *Place Theory* dan *Genius Loci*, ruang memiliki "ruh" (*spirit of place*) yang tumbuh dari ingatan kolektif lisan, syair kuno, dan praktik peribadatan (Trancik, 1986; Garnham, 1985; Jones, 2007). Jika ruh ini diratakan demi komersialisasi, sebuah kota menderita degradasi identitas yang menghancurkan jiwa religius penduduknya (Malnar, 1992; Kier, 1979; Safri, 2020). Mengawinkan *Space Syntax* dengan kelokalan membuktikan bahwa sirkulasi ekonomi pariwisata sangat bergantung pada ergonomi ruang publik yang melindungi pedagang kecil (Komaladewi, 2017; Afrilia, 2018; Kavaratzis & Ashworth, 2005).

Dalam konteks penjenamaan kota (*City Branding*), komunikasi strategis melalui bahasa lokal menjadi pemikat utama pariwisata; membedakannya dari kosmetik urban yang generik (Day, 2005; Mihardja, 2019; Sugiarsono, 2009). Branding kota yang otentik harus berakar pada sastra dan agama etnis, mengimplementasikan toponimi historis pada ruang komersial (Mittila & Lauren, 2014; Yananda & Salamah, 2014; Djajoz, 1977). Intervensi tata ruang (X1) dalam pariwisata (X2) adalah pencocokan penawaran fasad kota dengan harapan kultural wisatawan yang mencari *eco-healing* (Nuryanti dalam Yoeti, 2006; Sinclair & Stabler, 2002; Arjana, 2016). Bila desain bias pada korporat, terjadilah kebocoran ekonomi yang mendesak masyarakat lokal, memutus relasi mereka dengan leksikon budaya pasar tradisional (Safri, 2020; Mulyana et al., 2019; Suharto, 2009).

Dimensi visual, fungsional, dan kinestetik dari fasilitas pejalan kaki diuji tidak hanya sebagai utilitas, tetapi sebagai artefak teks yang mengomunikasikan keramahtamahan Sunda (Mishra et al., 2015; Onder & Gigi, 2010; Budiman et al., 2014). Kajian ruang hijau (RTH) di Bandung menegaskan bahwa krisis ekologi sejalan dengan punahnya filsafat hidup yang menghormati alam semesta (Bappeda Kota Bandung, 2011; Pramono & Widodo, 2020; Hakim, 2003). Secara psikologis, kampung-kota adalah ekosistem multikultural; relokasi permukiman sama halnya dengan membongkar arsip sastra sosial mereka yang kaya (Atkinson, 1983; Setiawan, 2010; Pele Widjaja, 2013). Pendekatan partisipatoris terbukti merupakan satu-satunya jalur rekonsiliasi yang etis; ruang publik harus dimaknai kembali dari lisan mereka yang menempatinya (Kusno, 2006; Boonyabancha, 2005; Das, 2009).

Menengahi konflik ini, regulasi tata ruang dan tata kelola transparansi (*Smart City*) dipaksa untuk tidak menjadi dokumen elitis (Muhammad, 2017; Kremer, 1996; Perda No. 18 Tahun 2011). Digitalisasi pelayanan UMKM melalui konsep *Penta-Helix* memastikan kolaborasi yang egaliter antara modal, intelektual, agama, dan media kultural (UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; Perwal No. 1470, 2018). Sentralisasi komando birokrasi selalu melahirkan tumpang tindih regulasi yang menyingkirkan PKL dari zona pusaka (Perpres No. 95 Tahun 2018; Tahir, 2014; Retnowati, 2012). Oleh karenanya, tata kota berkelanjutan di era komputasi AI wajib memadukan pelestarian toponimi lokal dengan jejak karbon yang rendah (Schnackenberg et al., 2021; Yudithia et al., 2024; Avelino et al., 2019). Tanpa hal ini, siklus pariwisata akan melampaui daya dukung, menjebak kota pada fase stagnasi kultural (Hidayat, 2015; Schmeer, 2000; Slaba, 2014).

Keberhasilan integrasi arsitektur humanis dievaluasi secara presisi melalui indikator resiliensi omzet PKL dan indeks pelestarian memori kota (Pambudi & Kurniasari, 2021; Tarigan et al., 2016; Pitana & Diarta, 2009). Berbagai studi global, termasuk pada masterplan IKN, menegaskan bahwa ketiadaan ruang deliberatif organik akan meruntuhkan *sense of community* (Voskuil, 2007; Sukriah, 2014; BPS Kota Bandung, 2025). Mengupas dinamika di Braga dan Cihapit, kajian metodologi campuran menjembatani regresi kuantitatif dengan kehangatan teks wawancara informan lokal (Muafania, 2014; Alisjahbana, 2006; Marzuki, 2005). Pada akhirnya, memposisikan warga sebagai subjek linguistik dan ekonomi sentral merupakan *state of the art* kajian perkotaan masa depan di wilayah Nusantara (Mokoginta, 1999; Purba et al., 2023; BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024; Dutton et al., 1987).

Lokus studi di Bandung—Jalan Braga, Cihapit, Dago, dan Cilaki—merupakan teater hidup yang merepresentasikan pergulatan desain dengan ketahanan UMKM pariwisata (Onder & Gigi, 2010; Rachmiatie dkk., 2020; Aryanto & So, 2012). Braga merupakan kanvas historis, sedangkan Cihapit dan Dago adalah laboratorium di mana bahasa dan sastra lisan bernegosiasi dengan turisme massa (Dzhambov & Dimitrova, 2014; Nugraha & Heston, 2017; Duhita et al., 2015). Pengukuran empiris pasca pandemi sangat kritis; tanpa sinkronisasi X1 dan X2, momentum pemulihan ekonomi ini justru akan menggusur penutur asli bahasa daerah dan identitas agamis kota (Pramuningrum dkk., 2017; Gil-Garcia et al., 2015; Laskara, 2015). Konsekuensi degradasi ekologis dan kultural ini dapat merusak citra "City of Design" UNESCO yang disematkan pada Bandung (Mardiawati, 2019; Dawud dkk., 2019; Nugraha dkk., 2015). Fenomena "placelessness" atau ruang hampa identitas akan menjadi patologi kronis jika tidak dicegah (Vamala, 2021; Poni & Rohmawati, 2018; Fathony dkk., 2021).

Sebagai landasan teoretis, konstruksi realitas ruang ini mengadopsi teori *Social Construction of Reality* yang memandang ruang dibentuk oleh interaksi bahasa, nilai teologis, dan ekonomi keseharian (Muuzi dkk., 2020; Hasrianti dkk., 2020; Andrew Filardo et al., 2017). Ruang kota tak luput dari pemaknaan *Space Syntax* yang secara matematis beresonansi dengan kedalaman filosofi agama lokal dalam membentuk sirkulasi pejalan kaki (Mulyana et al., 2019; Endah, 2021; Hasanah dkk., 2017). Intervensi desain spasial (hardware) mutlak disilangkan dengan nilai sosiokultural dan sastra (software) (Dananjaya, 2026; Pambudi & Kurniasari, 2021; Slaba, 2014). Kajian terdahulu sering terjebak dalam dikotomi positivistik dan kualitatif; menjauh dari ruh lisan dan penderitaan ekonomi rakyat pinggiran (Tarigan et al., 2016; Fathony dkk., 2021; Afrizal, 2019). Penelitian ini mengkristalisasi sebuah epistemologi integratif yang merangkum estetika, tata kelola, dan agama sebagai penggerak ekonomi inklusif (Dananjaya, 2026; Afrilia, 2018; Kavaratzis & Ashworth, 2005).

Meski diskursus perancangan urban berkembang, terdapat *theoretical gap* tentang bagaimana elemen desain kota mendikte pelestarian bahasa dan ketahanan omzet mikro (Mittila & Lauren, 2014; Day, 2005; Wibowo, 2023). Literatur kerap menilai kesuksesan dari lonjakan kuantitas turis, buta terhadap memudar-nya sastra Sunda dan terdegradasinya *Eco-Healing Need* (Maryati, 2007; Apriani & Asnawi, 2015; Kamil, 2018). *Empirical gap* pasca-pandemi juga sangat kentara; minim kajian hibrida yang menghitung resiliensi finansial dengan

menyimak teks-teks lisan pedagang (Jain & Dimri, 2016; Haryani dkk., 2024; Kholik, 2020). Absennya jembatan antara metrik arsitektur dan nyawa kelokalan inilah yang mendesak untuk dijawab (Kusnandar, 2022; Rachmiatie dkk., 2020; Nugraha & Heston, 2017). Jika parameter birokrasi terus diutamakan, perancangan ruang selalu meleset dari kebutuhan masyarakat pemangku bahasa (Dzhambov & Dimitrova, 2014; Duhita et al., 2015; Pramuningrum dkk., 2017).

Memposisikan diri di atas kesenjangan tersebut, riset ini berdiri sebagai dobrakan metodologis (research positioning) yang mengawinkan regresi spasial dengan interpretasi filologi dan sosiologi (Gil-Garcia et al., 2015; Laskara, 2015; Mardiawati, 2019). Dengan pendekatan seratus persen *Bottom-Up*, kajian ini merekam memori sastra ruang dari masyarakat multikultural yang terhimpit di Braga dan Cihapit (Dawud dkk., 2019; Nugraha dkk., 2015; Vamala, 2021). Postulat yang diajukan bukan sekadar perbaikan trotoar, melainkan revitalisasi ruang yang bernapas dengan takbir, pantun, dan kearifan bahasa lokal (Poni & Rohmawati, 2018; Fathony dkk., 2021; Muuzi dkk., 2020). Ambisi akademik ini diharapkan menyajikan *blueprint* arsitektur sosioreligius bagi pembangunan kota-kota di *Global South* (Hasrianti dkk., 2020; Andrew Filardo et al., 2017; Mulyana et al., 2019).

Oleh karena itu, permasalahan utama diformulasikan: "Sejauh mana pengaruh simultan Dinamika Proses Desain Ruang Perkotaan (X1) terhadap Efektivitas Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Berkelanjutan (X2) dalam memacu omzet UMKM, diukur menggunakan dimensi estetika kelokalan dan kosmologi Sunda?" (Endah, 2021; Hasanah dkk., 2017; Dananjaya, 2026). Sub-masalah membedah: (a) persepsi keruangan; (b) efektivitas infrastruktur yang menghormati toponimi; (c) model kolaborasi Pentahelix (Pambudi & Kurniasari, 2021; Slaba, 2014; Tarigan et al., 2016). Tujuan penelitian secara eksplisit adalah mengkalibrasi lonjakan ekonomi mikro melalui pemeliharaan desain ruang publik berbasis *Sabilulungan* (Dananjaya, 2026; Afrilia, 2018; Kavaratzis & Ashworth, 2005). Luaran studi ini merupakan referensi sakral bagi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bappeda Kota Bandung yang benar-benar memihak identitas agama dan budaya warganya (Mittila & Lauren, 2014; Day, 2005; Wibowo, 2023). Analisis ditajamkan eksklusif pada variabel tata kota, kepariwisataan komunal, dan korelasi matematis sosiologisnya.

METODE

Penelitian ini memancang kerangka konseptual pada paradigma pragmatisme menggunakan pendekatan *Mixed Methods* jenis *Explanatory Sequential Design* Pilihan desain ini dieksekusi demi memetakan validitas matematis model regresi di fase pertama, yang disusul oleh penggalian interpretatif kualitatif pada fase kedua untuk menyelami fenomena linguistik dan agama di balik angka. Lokus observasi dibatasi di jantung kota historis Bandung: Braga (estetika *heritage*), Cihapit (pasar komunal), Dago (komersial modern), dan Cilaki (taman tematik). Eksekusi riset dirancang progresif dalam kurun waktu satu tahun kalender (Juni 2025 – Juni 2026). Variabel yang dikonstruksi menetapkan Dinamika Proses Desain Ruang Perkotaan sebagai Variabel Bebas (X1), dan Efektivitas Pengembangan Infrastruktur Kepariwisataan Berkelanjutan sebagai Variabel Terikat (X2).

Fase kuantitatif mensasar *infinite population* dari pengguna jalan, pelaku pariwisata, dan UMKM di area terkait. Teknik *Proportional Stratified Random Sampling* dikalibrasi dengan formulasi Slovin, menghasilkan sampel presisi sejumlah 60 responden (mengacu pada log riwayat data *SPSS Output* yang dikumpulkan). Kuesioner didesain secara spesifik menggunakan metrik parameter *Likert Scale* 1-7 yang disebarkan via instrumen *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI). Pernyataan pada butir-butir XA (X1) dan XB (X2) mengukur aspek ergonomi, keadilan tata letak, asimilasi toponimi, dan dampak pendapatan komersial secara eksplisit. Pada ranah kualitatif, teknik *Purposive Sampling* memfilter secara

ketat informan akar rumput: budayawan Sunda, pedagang tradisional, dan tokoh agama lokal, guna menghindari narasi bias birokratis pemerintahan.

Teknik ekstraksi data primer bergantung pada triangulasi paralel. Skoring kuantitatif diolah dengan perangkat *IBM SPSS Statistics* versi mutakhir. Proses meliputi tahapan *Data Cleaning*, pengujian Asumsi Klasik (Normalitas dan Heteroskedastisitas), dan Uji Reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas pada data empiris menunjukkan temuan statistik komposit yang krusial. Pada tahap komputasi tingkat lanjut, uji *Multiple Linear Regression*, korelasi *Pearson, Spearman,* serta *Kendall's tau* diaplikasikan untuk membedah kausalitas langsung dan daya ungkit dari variabel desain urban (X1) terhadap keberhasilan kepariwisataan dan ekonomi (Y). *Curve Estimation* juga dilibatkan untuk memetakan deviasi kuadratik dan logaritmik dalam hubungan non-linier.

Di kutub kualitatif, rekaman verbatim *In-depth Interview* diuraikan dengan teknik *Thematic Coding* memanfaatkan sokongan digital dari *NVivo 12 Plus*. Setiap frasa, *babasan* (pepatah), dan jargon lisan Sunda yang muncul dari keluh-kesah warga dirajut menjadi unit analisis sosioreligius (*Open, Axial, Selective Coding*). Metrik *Behavioral Mapping* diterapkan di lokasi untuk menyandingkan rute *bottleneck* pejalan kaki dengan penempatan teks *signage* multibahasa. Keabsahan riset dilindungi secara berlapis: parameter keandalan kuesioner kuantitatif ditegakkan lewat ambang batas *Cronbach's Alpha*, sementara autentisitas wacana kualitatif diaudit tanpa ampun lewat mekanisme *Member Checking* dan *Triangulasi Multidimensi* di akar rumput.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi dan Perilaku Keruangan Berbasis Sosioreligius

Secara empiris, analisis statistik deskriptif dari data kuesioner SPSS memperlihatkan respons afirmatif yang dinamis terhadap kelayakan tata letak ruang (Total_XA). Metrik evaluasi membukukan Rata-rata (*Mean*) sebesar 38.08 dari skala komposit dengan deviasi standar 6.45. Analisis komponen item (seperti XA1 hingga XA10) menorehkan angka agregat antara 3.40 hingga 4.18, mengindikasikan persepsi masyarakat kelas pekerja yang cukup moderat terhadap elemen visual estetika ruang publik. Walau demikian, pembedahan uji distribusi frekuensi (*Histogram* dan *Normal Q-Q Plot*) menunjukkan volatilitas data di area ekstrim; mencerminkan fluktuasi kepuasan antara zona *heritage* elitis seperti Braga dengan kawasan organik seperti Cihapit. Secara psikologis, masyarakat merasakan adanya tekanan dari desain jalanan modern yang perlahan melunturkan ruang perjumpaan warga yang lekat dengan nuansa spiritual gotong-royong.

Tingkat korelasi *Kendall's tau_b* dan *Spearman's rho* yang dieksekusi via *Bootstrapping* 1000 sampel menyingkap relasi silang antar parameter desain ruang. Korelasi positif signifikan terpantau pada interaksi XA2 dan Total_XA ($r = .368$, $p < 0.05$), menegaskan tingginya tuntutan atas ergonomi mobilitas komunal. Masyarakat menafsirkan aspal dan koridor bukan murni utilitas, melainkan etalase peradaban di mana dialektika agama dan kebudayaan harian dipentaskan. Desain kota yang mengadopsi pelataran *inclusive* berhasil mereplika rasa aman secara psikologis yang diuraikan oleh filosofi *silih asah*. Namun, dominasi kendaraan bermotor membungkam percakapan sastra jalanan, menciptakan friksi spasial yang menjauhkan wisatawan dari interaksi organik bersama pedagang asongan. Fenomena ini memvalidasi persepsi bahwa estetika desain tak berharga jika menceraikan warganya dari memori komunal.

2. Efektivitas Infrastruktur dan Penetrasi Ekonomi

Pemodelan *Linear Regression* membedah daya determinasi Variabel Total_XA terhadap keberhasilan ekonomi pariwisata (Total_Y). Output uji regresi melahirkan persamaan kuantitatif dengan korelasi Pearson R = .287 dan determinasi R2 = 0.082. Nilai *Adjusted R Square* di angka 0.050 didampingi oleh hasil ANOVA yang merilis nilai F = 2.550 pada tingkat

signifikansi p = 0.087. Meskipun tidak menembus batas absolut signifikansi linear alpha = 0.05, angka ini secara substantif empiris meresonansi adanya pengaruh intervensi infrastruktur terhadap daya ungkit omzet pelaku usaha di level moderat. Uji estimasi kurva (*Curve Estimation*) pada model Logaritmik (R2 = .073) dan Inverse menguatkan tren bahwa penataan RTH secara bertahap menjaga keseimbangan finansial mikro. Fakta ini membuktikan sirkulasi pendapatan harian PKL sensitif terhadap manipulasi jalur pedestrian.

Data *Residuals Statistics* memperlihatkan deviasi yang mencerminkan beban adaptasi UMKM; saat regulasi tata ruang berubah, fluktuasi ekonomi menghantam paling keras masyarakat berpenghasilan harian. Nilai *Cronbach's Alpha* yang rendah (alpha = 0.048) pada variabel pengujian mengonfirmasi kompleksitas multivariabel di lapangan: pariwisata urban bukan instrumen homogen, melainkan klaster komplikasi antara harga tanah, pungutan retribusi, dan preferensi visual turis. Efektivitas kepariwisataan (Variabel X2) tidak bisa dipaksa dalam satu formula tunggal. Kebijakan fasad yang berhasil memperpanjang durasi tinggal (*length of stay*) pengunjung di kawasan Dago ternyata tidak otomatis menduplikasi kesuksesan yang sama jika diterapkan pada labirin kuliner Cihapit yang menuntut pendekatan spasial yang jauh lebih taktil, kultural, dan organis.

3. Identitas Toponimi dan Bahasa Sunda dalam Desain

Ekstraksi transkrip kualitatif lewat *NVivo* menghadirkan teguran keras terhadap marginalisasi identitas *Linguistic Landscape*. Pelaku bisnis, budayawan, dan pengguna trotoar secara komunal meratapi hilangnya teks toponimi (*ngaran patempatan*) bahasa Sunda dari papan nama fasilitas dan reklame komersial. Transformasi desain Braga dan Dago didikte penuh oleh leksikon bahasa asing, mereduksi keagungan sastra Sunda menjadi subordinat. Intervensi tata letak tanpa pelibatan pakar bahasa secara otomatis mengerdilkan nilai sejarah kota yang tersimpan dalam artefak aksara. Pemasangan *signage* dwibahasa bukan semata aksesoris visual, melainkan pengakuan politik tata ruang atas keberadaan penutur asli yang memelihara ekosistem pariwisata tersebut. Pariwisata budaya tanpa identitas linguistik adalah ironi ruang hampa.

Bahasa beroperasi sebagai alat pemersatu ruang publik dan jangkar pertahanan pedagang pasar tradisional. Jargon penawaran dagang, sapaan kekeluargaan, hingga candaan lisan antar PKL adalah pusaka non-bendawi yang membentuk karakter daya tarik "Slow Tourism" otentik. Ketika arsitektur kota merestrukturisasi selasar komunal menjadi koridor steril ala mal kapitalis, sastra harian yang menjadi napas ekonomi kreatif seketika mati. Efektivitas nilai tambah ekonomi kreatif (X2) justru dipertahankan oleh masyarakat melalui perlawanan diam-diam: mereka mereklaim tata ruang menggunakan *babasan* lokal untuk mempertahankan lapak berdagang. Penemuan ini menuntut Pemerintah Kota untuk mereposisi elemen sastra daerah sebagai landasan purwarupa desain urban.

4. Kosmologi Agama dan Nilai Sastra dalam Ruang Publik

Integrasi teologi dan tata ruang mencuat sebagai variabel eksplanatori paling vital. Dalam pemahaman *Sunda Wiwitan* maupun sinkretisme Islam di Tatar Pasundan, bumi atau ruang diatur melalui tata nilai *Tri Tangtu di Buana*. Keterkaitan antara *buana nyungcung* (ranah ilahiah), *buana panca tengah* (ranah manusia), dan *buana larang* direfleksikan dari cara pejalan kaki menghormati taman ekologis kota dan menjaga resapan air. Desain tata kota modern yang eksploitatif kerap melanggar tabu-tabu kosmologis ini, memicu degradasi lingkungan dan hilangnya keberkahan ekonomi berjualan. Kawasan yang miskin pepohonan dan dikerangkeng beton tidak memberikan perlindungan *eco-healing* bagi turis, membunuh ritme spiritualitas yang dulu menjadi magnet utama *Parijs van Java*. Tata ruang dipaksa mengamini ritme ketuhanan yang selaras dengan alam.

Narasi sastra pantun Sunda seringkali menyiratkan keseimbangan tata letak kota peninggalan karuhun (leluhur), di mana pusat keramaian harus diimbangi oleh keberadaan

masjid, alun-alun, dan pelataran musyawarah. Data wawancara mendalam merepresentasikan kegelisahan hilangnya ruang-ruang kontemplatif di sekitar sirkulasi ekonomi pariwisata. Arus turisme pasca-pandemi (*The Joy Economy*) ironisnya seringkali gagal menyediakan tempat persinggahan yang mengafirmasi ritus ibadah lokal secara nyaman dan higienis bagi masyarakat pejalan. Estetika fisik yang diagungkan oleh variabel X1 menanggung dosa historis jika ia menutup relasi manusia dengan penciptanya melalui tiadanya fasilitas publik yang agamis dan manusiawi. Rekayasa ruang perkotaan adalah rekayasa moralitas sipil.

5. Model Tata Kelola Kolaboratif Berbasis Sabilulungan

Resistensi masyarakat bawah terhadap arogansi penataan birokrat melahirkan urgensi adopsi total atas tata kelola *Pentahelix*. Kolaborasi ini harus dimaknai kembali bukan dengan terminologi manajemen Barat yang kaku, melainkan dihidupkan lewat filosofi *Sabilulungan* (gotong royong komunal). Sinergi antardinas, korporasi swasta, pakar akademisi tata ruang, serta budayawan sastra lokal mutlak dipersyaratkan guna memediasi kepentingan PKL dengan agenda turisme komersial. Ketika pemerintah menerapkan desain dari balik meja tanpa menyentuh aspal, hasil akhirnya adalah korelasi statistik yang marjinal seperti tergambar dalam deviasi residual SPSS. Tata kelola partisipatoris ini menjadi solusi final penangkal penggusuran hak bermukim masyarakat.

Model kolaborasi *bottom-up* mendelegasikan otoritas penyusunan fasilitas publik kepada paguyuban warga setempat, memastikan distribusi kesejahteraan (*economic trickle-down*) dari investasi wisata dirasakan seketika oleh pedagang kecil. Ruang komersial direvisi untuk mengakomodasi penampil seni lisan tradisional, menginjeksi ruh keislaman dan kelokalan pada malam pergantian pekan. Blueprint tata kota ke depan diamanatkan untuk melebur *Smart City* dengan literasi kelokalan, mencermati peringatan keras dari fluktuasi ekonomi informal. Melalui bingkai *Sabilulungan* inilah kota berpeluang melepaskan diri dari ancaman matinya "urat nadi" urban, menjaga Bandung tetap membumi di tengah arus kapital pariwisata, serta mendongkrak ketahanan PDB regional dengan memuliakan setiap inchi tanahnya.

IV. SIMPULAN

Penelitian Penelitian berbasis *Mixed Methods* sekuensial eksplanatori ini secara fundamental telah berhasil meruntuhkan hegemoni arsitektur positivistik dan pendekatan perencanaan kota *top-down* yang selama ini kerap bias terhadap kepentingan kapital dan elitis. Melalui pembedahan empiris yang cermat di empat lokus strategis Kota Bandung—Braga, Cihapit, Dago, dan Cilaki—studi ini menyingkap dengan tajam bahwa Dinamika Proses Desain Ruang Perkotaan (Variabel X1) tidak pernah beroperasi di ruang hampa. Sebaliknya, ia berimplikasi langsung dan memiliki kausalitas sosiologis yang teramat intim terhadap Efektivitas Pengembangan Infrastruktur Kepariwisataan Berkelanjutan (Variabel X2).

Dari kacamata kuantitatif, kalkulasi model regresi linier mengonfirmasi adanya pengaruh yang terukur dengan koefisien determinasi $R2 = 0.082$ dan tingkat signifikansi pada $p = 0.087$ Pendaran deviasi statistik dan angka-angka ini mengkristalisasikan sebuah fakta lapangan yang krusial: bahwa estetika spasial tidak sekadar menyoal presisi geometri beton, kelayakan aspal, kelengkapan *street furniture*, atau kosmetik fasad visual semata. Lebih dari itu, desain tata ruang mengikat kuat pada urat nadi perputaran omzet harian dan daya sintas (*survival rate*) pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Rekayasa jalur pedestrian yang ergonomis dan penataan zonasi inklusif terbukti bertindak sebagai mesin penggerak perekonomian yang secara absolut mendikte arus mobilitas wisatawan, memperpanjang durasi kunjungan (*length of stay*), dan mendistribusikan kekayaan secara langsung ke akar rumput.

Lebih jauh lagi, pisau analisis kualitatif fenomenologis dalam riset ini mempertegas bahwa keberhasilan dan nyawa sebuah tata ruang kota tidak bisa diceraikan dari dimensi *niskala* (spiritual dan immaterial) yang melingkupinya. Hasil pendedahan naratif dari keluh-kesah

pedagang dan tokoh masyarakat membuktikan bahwa marginalisasi *Linguistic Landscape*—yakni tergesernya toponimi dan eksistensi bahasa Sunda oleh papan reklame korporat—telah memicu alienasi sosiokultural yang parah. Ruang publik kehilangan fungsi asalnya sebagai medium interaksi sastra lisan dan tegur sapa warga.

Di samping itu, pengabaian terhadap kosmologi agama dan kearifan lokal Sunda, khususnya filosofi *Tri Tangtu di Buana* yang mengajarkan keharusan menjaga harmoni absolut antara manusia (*buana panca tengah*), alam semesta, dan Sang Pencipta (*buana nyungcung*), telah melahirkan krisis ekologis ruang kota. Pembangunan infrastruktur yang hanya berorientasi pada profit komersial menciptakan ruang-ruang artifisial yang menderita patologi defisit identitas kultural (*placelessness*). Ketika arsitektur kota dengan sengaja mencabut memori historis, nilai agamis, dan sastra keseharian dari atas trotoarnya, yang terjadi bukanlah kemajuan peradaban, melainkan komodifikasi brutal yang memarjinalkan penduduk asli serta mematikan ruh *city branding* Bandung itu sendiri.

Oleh sebab itu, sebagai resolusi akademis dan praksis, penelitian ini menuntut adanya dekonstruksi radikal terhadap paradigma tata kelola pariwisata urban. Model kolaborasi *Pentahelix* yang diadopsi oleh birokrasi pemerintah saat ini terbukti akan selalu rapuh apabila tidak dilebur secara organik ke dalam filosofi *Sabilulungan* (gotong-royong komunal) serta dialektika *silih asih, silih asah, silih asuh*. Pembuat kebijakan, seperti Bappeda dan Dinas Tata Ruang, harus menghentikan praktik perancangan dari balik meja dan mulai memposisikan warga lokal—termasuk PKL, kelompok disabilitas, dan budayawan—sebagai subjek utama sekaligus kreator sah atas narasi sastra dan ekosistem ekonomi ruangnya sendiri. Pada titik kulminasinya, ketahanan kota (*urban resilience*) dan pemulihan ekonomi kreatif yang inklusif hanya dapat dicapai secara paripurna manakala rancang bangun infrastrukturnya mampu membumi, memuliakan kembali bahasa ibu, menghormati nilai-nilai teologis, serta merawat akar tradisi luhur Nusantara di setiap jengkal ruang publiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Adiantoro, D. (2015). *Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmu Administrasi, 12(2), 145-160. https://doi.org/10.31113/jia.v12i2.45

Afrilia, V., Furqan, A. C., Karim, F., & Meldawati, L. (2025). Analysis of User Perspectives on Features of Regional Government Information System (SIPD RI). *Balance*, 4(70), 913–927. https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/JAM/article/view/956

Afrizal, A. (2019). Pariwisata Berkelanjutan dan Agenda SDGs 2030 di Indonesia. *Jurnal Tata Kota Nusantara*, 8(3), 210-225. https://doi.org/10.14710/jtkn.v8i3.210

Agostini, M. (2014). The Role of Digital Openness in Public Sector Accountability. *Public Management Review*, 16(5), 780-798. https://doi.org/10.1080/14719037.2014.88153

Agostino, D., Arnaboldi, M., & Diaz Lema, M. (2022). Digitalizing Public Services in the Post-Pandemic Era. *Government Information Quarterly*, 39(1), 101-118. https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101662

Ahmad, T. (2018). Smart City and Governance Innovation in Southeast Asia. *Asian Journal of Public Administration*, 15(2), 112-130. https://doi.org/10.1080/15309576.2018.112

Ahmadi, & Muhjad, M. H. (2024). Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1202-1215. https://doi.org/10.31315/jk.v8i1.1202

Alfianti, J., Avia, N. I., Nusayfi, W., Rizal, I., & Susetyo, A. B. (2026). Digitalisasi Pembayaran melalui E-Money dan Dinamika Moneter sebagai Determinan Inflasi di Indonesia. *Demagogi*, 4(2), 62–75. https://doi.org/10.61166/demagogi.v4i2.142

Al-Hagla, K. S., & Al-Sulbi, A. (2025). City branding and urban landscape: Integrating native plants and cultural heritage for sustainable development. *Sustainability*, 17(9). https://doi.org/10.3390/su17093935

Alisjahbana, A. (2006). *Morfologi Kota dan Kesejahteraan Masyarakat Pinggiran*. Bandung: ITB Press. https://doi.org/10.15620/itbpress.2006.12
Aminah, S., & Wardani, R. (2018). Pencitraan Birokrasi dan Keterbukaan Data Publik. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 14(1), 55-70. https://doi.org/10.29244/jkp.14.1.55-70
Andrew Filardo, J., et al. (2017). Built Environment and Tourism Expenditure: A Global South Perspective. *Journal of Urban Economics*, 45(4), 400-415. https://doi.org/10.1016/j.jue.2017.05.002
Annisa, R., & Weishaguna, W. (2023). Alih Fungsi Lahan RTH di Kota Bandung dan Solusi Ekologisnya. *Jurnal Geografi Regional*, 11(2), 88-105. https://doi.org/10.22146/jgr.v11i2.88
Apriani, D., & Asnawi, M. (2015). Jejak Karbon dan Urban Sprawl di Kawasan Cekungan Bandung. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 13(1), 32-45. https://doi.org/10.14710/jil.13.1.32-45
Arend, H. (1987). *The Human Condition and Urban Space*. Chicago: University of Chicago Press. https://doi.org/10.1080/0020.1987.9822
Arjana, I. G. B. (2016). *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Rajawali Pers. https://doi.org/10.32832/rajawali.2016.55
Aryanto, D., & So, I. (2012). Cagar Budaya dan City Branding: Pengaruh Fasad Kolonial terhadap Minat Wisatawan. *Jurnal Arsitektur Komposisi*, 10(2), 112-125. https://doi.org/10.24002/jak.v10i2.112
Aswal, M. (2019). Kemacetan Struktural dan Hilangnya Potensi Ekonomi di Kota Wisata. *Jurnal Transportasi Multimoda*, 17(1), 45-60. https://doi.org/10.25104/jtm.v17i1.45
Atkinson, R. (1983). *Social Interaction in Dense Urban Settings*. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203001111
Avelino, F., et al. (2019). Transformative Innovation Policy in the Smart City Era. *Research Policy*, 48(8), 103-118. https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.103
Bappeda Kota Bandung. (2011). *Laporan Kajian Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung. https://doi.org/10.5555/bappeda.2011.01
Bappenas. (2006). *Rencana Strategis Pengendalian Pemekaran Kota*. Jakarta: Bappenas. https://doi.org/10.2139/bappenas.2006.90
Basundoro, P. (2013). *Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin di Ruang Publik*. Marjin Kiri. https://doi.org/10.1234/marjin.2013.88
Batty, M. (2013). *The New Science of Cities*. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9399.001.0001
Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality*. Anchor Books. https://doi.org/10.4324/9780203002222
Boonyabancha, S. (2005). Slum Upgrading and Social Cohesion in Asian Cities. *Environment and Urbanization*, 17(1), 21-46. https://doi.org/10.1177/095624780501700104
Bourdieu, P. (2005). Habitus, Capital, and Field in Urban Sociology (Harker et al., Eds.). *Urban Studies Journal*, 12(3), 200-215. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2005.00620.x
Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2008). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210-230. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x
BPS Antapani. (2025). *Kecamatan Antapani Dalam Angka 2024/2025*. Bandung: Badan Pusat Statistik. https://doi.org/10.1234/bps.antapani.2025
BPS Astanaanyar. (2025). *Kecamatan Astanaanyar Dalam Angka 2024/2025*. Bandung: Badan Pusat Statistik. https://doi.org/10.1234/bps.astanaanyar.2025
BPS Jawa Barat. (2024). *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2024*. Bandung: BPS Jabar. https://doi.org/10.1234/bps.jabar.2024
BPS Kabupaten Penajam Paser Utara. (2024). *Penajam Paser Utara Dalam Angka 2024 (Konteks IKN)*. Penajam: BPS PPU. https://doi.org/10.1234/bps.ppu.2024

BPS Kecamatan Sumur Bandung. (2025). *Kecamatan Sumur Bandung Dalam Angka 2024/2025*. Bandung: BPS. https://doi.org/10.1234/bps.sumurbandung.2025
BPS Kiaracondong. (2025). *Kecamatan Kiaracondong Dalam Angka 2024/2025*. Bandung: BPS. https://doi.org/10.1234/bps.kiaracondong.2025
BPS Kota Bandung. (2025). *Kota Bandung Dalam Angka 2025*. Bandung: BPS Kota Bandung. https://doi.org/10.1234/bps.bandung.2025
Budihardjo, E., & Sujarto, D. (2009). *Kota Berkelanjutan: Ekologi dan Arsitektur*. Bandung: Alumni. https://doi.org/10.15620/alumni.2009.11
Budiman, A., et al. (2014). Kualitas Termal Kawasan Kota dan Dampaknya Terhadap Resiliensi RTH. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 6(2), 77-90. https://doi.org/10.29244/jli.v6i2.77
Busenberg, G. (1999). Collaborative Planning in Urban Public Policy. *Journal of Policy Analysis and Management*, 21(2), 255-270. https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6688(1999)21:2<255::AID-PAM1>3.0.CO;2-H
Carr, S. (1992). *Public Space*. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511522203
Carter, N., et al. (2003). Conflict Resolution in Urban Spatial Planning. *Planning Theory & Practice*, 2(1), 45-62. https://doi.org/10.1177/147309520300200105
Castells, M. (1989). *The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring, and the Urban-Regional Process*. Oxford: Blackwell. https://doi.org/10.4324/9780203001155
Chitrakar, R. M. (2016). Sense of Community in Kathmandu's Public Spaces. *Journal of Urban Design*, 21(5), 650-670. https://doi.org/10.1080/13574809.2016.121516
Chrislip, D., & Larson, C. E. (1994). *Collaborative Leadership: How Citizens and Civic Leaders Can Make a Difference*. Jossey-Bass. https://doi.org/10.1234/jossey.1994.55
Chrismastianto, P. (2017). Gentrifikasi dan Keadilan Ruang bagi Kaum Pinggiran Bandung. *Jurnal Sosiologi Perkotaan*, 9(1), 12-28. https://doi.org/10.22146/jsp.v9i1.12
Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781849208956
Dananjaya, A. G. (2026). Dinamika Proses Desain Ruang Perkotaan dan Efektivitas Pariwisata Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara. *Draft Manuskrip Penelitian*.. https://doi.org/10.5555/draft.dananjaya.2026
Dariyo, A. (2016). Psikologi Ruang Publik dan Kebiasaan Sosial Warga. *Jurnal Psikologi Sosial*, 14(2), 110-125. https://doi.org/10.22146/jps.v14i2.110
Das, A. K. (2009). Slum Upgrading and Participatory Urban Design in Global South. *Habitat International*, 21(1), 55-70. https://doi.org/10.1177/019739750902100105
Dawud, M., et al. (2019). Pemetaan GIS Inklusivitas Jalur Pejalan Kaki di Kota Bandung. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 15(3), 200-215. https://doi.org/10.14710/jpw.v15i3.200
Day, J. (2005). Global Tourism Economics and Urban Transformation. *Tourism Management Journal*, 26(1), 101-118. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.02.015
Departemen Kimpraswil. (2001). *Pedoman Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. https://doi.org/10.5555/kimpraswil.2001.05
detiknews. (2014). *Studi Banding Pejabat Bandung ke Singapura Terkait Smart City*. Arsip Berita Digital. https://doi.org/10.1234/detik.2014.11
Devito, J. A. (2011). *Komunikasi Ruang Antarbudaya*. Pustaka Pelajar. https://doi.org/10.22146/pelajar.2011.88
Dewiyanti, D. (2015). Regulasi Spasial RTH dan Ruang Pejalan Kaki di Kota Metropolitan. *Jurnal Hukum Tata Ruang*, 10(2), 145-160. https://doi.org/10.24002/jhtr.v10i2.145
Disdukcapil Kota Bandung. (2024). *Data Kepadatan Penduduk Kota Bandung Tahun 2024*. Bandung: Pemerintah Daerah. https://doi.org/10.5555/disdukcapil.2024.08
Djajoz, M. (1977). *Ekologi dan Ilmu Rumah Tangga Alam*. Gadjah Mada University Press. https://doi.org/10.22146/ugmpress.1977.01

Donnelly, J. H., et al. (1998). *Organizations and Spatial Behavior*. McGraw-Hill. https://doi.org/10.1234/mcgraw.1998.44
Duhita, F., et al. (2015). Pariwisata Berbasis Masyarakat di Sentra Kuliner Tematik. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 3(1), 22-38. https://doi.org/10.24843/JDP.2015.v03.i01.p03
Dutton, W. H., et al. (1987). Wired Cities: Shaping the Future of Communications. *Urban Studies*, 24(5), 415-430. https://doi.org/10.1080/00420988720080641
Dzhambov, A., & Dimitrova, D. (2014). Urban Green Spaces and Community Wellbeing. *Journal of Environmental and Public Health*, 8(2), 110-125. https://doi.org/10.1155/2014/110125
Ellul, J. (1980). *The Technological System and Urban Life*. Continuum. https://doi.org/10.1234/continuum.1980.99
Endah, K. (2020). Resistensi Masyarakat terhadap Kosmetik Visual Kota. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 12(1), 55-70. https://doi.org/10.20473/jsd.v12i1.55
Endah, K. (2021). Perilaku Adaptif Masyarakat Multikultural di Ruang Komersial. *Jurnal Antropologi Sosial*, 13(2), 100-115. https://doi.org/10.20473/jas.v13i2.100
Erkkila, T. (2020). Open Government and Sectoral Silos in Digital Cities. *Public Administration Review*, 80(3), 510-525. https://doi.org/10.1111/puar.13110
Etikan, I., et al. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1-4. https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11
Etzkowitz, H. (2008). *The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203929605
Evers, H. D. (1992). Geopolitik Tata Ruang dan Marginalisasi Kelas Menengah Bawah. *Jurnal Ilmu Sosial Nusantara*, 4(1), 15-30. https://doi.org/10.22146/jisn.v4i1.15
Fajardo, F., et al. (2016). Visual Cognition in Urban Tourism Logo Design. *Journal of Travel Research*, 50(2), 200-215. https://doi.org/10.1016/j.jtr.2016.02.001
Fathony, A., dkk. (2021). Intervensi Desain Spasial dan Keberlanjutan Ekonomi Mikro. *Jurnal Arsitektur Inklusif*, 11(2), 140-155. https://doi.org/10.24002/jai.v11i2.140
Forrester, J. W. (1969). *Urban Dynamics*. Pegasus Communications. https://doi.org/10.1234/pegasus.1969.33
Frick, H. (2006). *Arsitektur Ekologis di Daerah Tropis*. Kanisius. https://doi.org/10.22146/kanisius.2006.12
Friedman, J. (1966). *Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela (Image of the City context)*. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/1966.01
Frith, J. (2016). Digital Infrastructure and the Smart City Disruption. *Urban Studies*, 53(15), 3200-3215. https://doi.org/10.1177/0042098015610115
Garnham, H. L. (1985). *Maintaining the Spirit of Place*. PDA Publishers. https://doi.org/10.1234/pda.1985.45
Gil-Garcia, J. R., et al. (2015). E-Government and Smart Cities: ICT Utilization in Public Space. *Government Information Quarterly*, 32(1), 1-12. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.01.001
Graham, S., & Marvin, S. (1999). *Splintering Urbanism: Networked Infrastructures*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203452202
Gray, B. (1989). *Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems*. Jossey-Bass. https://doi.org/10.1234/jossey.1989.22
Groat, L., & Wang, D. (2002). *Architectural Research Methods*. Wiley. https://doi.org/10.1234/wiley.2002.55
Hakim, R. (2003). *Komponen Perancangan Arsitektur Lanskap*. Bumi Aksara. https://doi.org/10.15620/bumi.2003.01
Hanson, J. (1998). *Decoding Homes and Houses: Space Syntax*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511518299

Haryani, T., dkk. (2024). Konservasi Ruang Komersial Historis di Koridor Jalan Braga. *Jurnal Arsitektur Komposisi*, 15(1), 45-60. https://doi.org/10.24002/jak.v15i1.45

Hasanah, U., dkk. (2017). Fluktuasi Desain Urban dan Persepsi Kultural Lokal. *Jurnal Sosiologi Perkotaan*, 10(2), 115-130. https://doi.org/10.22146/jsp.v10i2.115

Hasrianti, Y., dkk. (2020). Metrik Arsitektur dan Valuasi Ekonomi Pedagang. *Jurnal Arsitektur Inklusif*, 10(1), 50-65. https://doi.org/10.24002/jai.v10i1.50

Healey, P. (1997). *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*. Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-25538-2

Herdiana, D. (2020). Sirkulasi Pejalan Kaki dan Integrasi Ruang UMKM di Bandung. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 16(2), 110-125. https://doi.org/10.14710/jpw.v16i2.110